



RENJA 2026

KECAMATAN TUNGKAL ILIR



Lokasi

Jl. Deltapura RT 10, Kel. Tungkal II, Kec.
Tungkal ilir, Kab. Tanjung Jabung Barar



Hubungi Kami

kec.tungkalilir@gmail.com



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja disusun untuk jangka waktu satu tahun mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Barat Tahun Anggaran 2026.

Kuala Tungkal, 12 Agustus 2025

CAMAT TUNGKAL ILIR



EFFENDY SE
PEMBINA
NIP.197105032006041002

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II: VALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ILIR TAHUN 2025..... | 7 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tungkal Ilir..... | 7 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tungkal Ilir..... | 27 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec. Tungkal Ilir. | 32 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 35 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 42 |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR..... | 43 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 43 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tungkal Ilir..... | 44 |
| A. Tujuan | 44 |
| B. Sasaran..... | 45 |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | 46 |
| IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 50 |
| SASARAN 1. Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan | 50 |
| SASARAN 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 52 |
| SASARAN 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kecamatan | 52 |
| SASARAN 4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | 53 |
| BAB V | 63 |
| PENUTUP | 63 |
| LAMPIRAN | |
| 1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja..... | 60 |
| 1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan | 61 |
| 1.3. Rencana Tindak Lanjut..... | 61 |
| <u>TABEL-TABEL</u> | |
| Tabel 2.1 Realisasi Belanja pada Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2025..... | 8 |
| Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Barat..... | 15 |
| Tabel 2.3 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran..... | 28 |
| Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat..... | 30 |
| Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung..... | 36 |
| Tabel 3.2. Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran..... | 46 |
| Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050..... | 54 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem Rencana Kerja Daerah, karena Rencana Kerja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana Kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya, Pengembangan Kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Tungkal Ilir sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja Kantor Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2026, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kantor Camat Tungkal Ilir merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Rencana Kerja OPD akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, antara dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan untuk 1 Tahun yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

4. Menjaga Kesesuaian Kegiatan Lanjutan maupun Kegiatan Baru sehingga dapat menjalankan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil Langkah – Langkah kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun - tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Tungkal Ilir ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini mengulas permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini dimuat pendahuluan tentang rencana kerja Kecamatan Tungkal ilir dan keterkaitannya dengan Renstra Kecamatan Tungkal ilir, serta dengan proses penyusunan RAPBD.

Bab II, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan. Diantaranya; Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Lalu disertakan pula analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, serta hasil review terhadap RKPD.

Bab III, bab ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Tungkal Ilir, tujuan dan sasaran Renja, serta Program kegiatan dan sub-kegiatan.

Bab IV, pada bab ini tertuang total kebutuhan dana/pagu indikatif Kecamatan Tungkal Ilir tahun 2026 yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif tahun 2027.

Bab V Penutup, pada bab terakhir berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Tungkal Ilir dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ILIR TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tungkal Ilir

Dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Tungkal Ilir pada tahun 2025 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagai berikut pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Realisasi Belanja pada Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2025

| No | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | | SISA |
|----|---|----------------------|--------------------|---------|------------------|
| | | | (Rp) | % | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | Rp 4 | 5 | Rp 6 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Rp 10.725.482.188,00 | Rp 9.665.469.983 | 90,11% | Rp 1.060.012.205 |
| | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 52.990.000 | Rp 52.190.000 | 100,77% | Rp 800.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 27.500.000 | Rp 26.700.000 | 97,09% | Rp 800.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 25.490.000 | Rp 25.490.000 | 100 % | - |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 8.544.286.788 | Rp 7.641.268.696 | 89,43% | Rp 903.018.092 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 8.304.266.788 | Rp 7.401.598.696 | 89,13% | Rp 902.668.092 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----|-------------|----|-------------|---------|----|------------|
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp | 240.020.000 | Rp | 239.670.000 | 99,85% | Rp | 350.000 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp | 118.550.000 | Rp | 112.745.000 | 95,10% | Rp | 5.805.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Rp | 88.550.000 | Rp | 87.745.000 | 99,09 % | Rp | 805.000 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp | 30.000.000 | Rp | 25.000.000 | 83,33% | Rp | 5.000.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp | 381.133.400 | Rp | 357.238.492 | 79,52% | Rp | 23.894.908 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Rp | 30.002.000 | Rp | 29.972.605 | 99,9% | Rp | 29.395 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp | 109.028.000 | Rp | 107.335.923 | 98,45% | Rp | 1.692.077 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp | 72.000.000 | Rp | 68.390.000 | 94,99% | Rp | 3.610.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp | 67.990.400 | Rp | 64.606.640 | 95,02% | Rp | 3.383.760 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp | 102.113.000 | Rp | 86.933.324 | 85,13% | Rp | 15.179.676 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 432.700.000 | Rp | 425.545.001 | 98,35% | Rp | 7.154.999 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|-------------|----|-------------|--------|----|------------|
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp | 364.000.000 | Rp | 357.280.001 | 98,15% | Rp | 6.719.999 |
| | Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya | Rp | 68.700.000 | Rp | 68.265.000 | 99,73% | Rp | 435.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 985.152.000 | Rp | 950.539.706 | 96,48% | Rp | 34.612.294 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | 12.000.000 | Rp | 12.000.000 | 100% | | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | Rp | 141.552.000 | Rp | 109.894.718 | 77,64% | Rp | 31.657.282 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp | 831.600.000 | Rp | 828.644.988 | 99,64% | Rp | 2.955.012 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 210.670.000 | Rp | 125.943.088 | 59,78% | Rp | 84.726.912 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp | 145.340.000 | Rp | 61.063.088 | 42,01% | Rp | 84.276.912 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp | 29.960.000 | Rp | 29.880.000 | 99,73% | Rp | 80.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Rp | 35.370.000 | Rp | 35.000.000 | 98,95% | Rp | 370.000 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp | 109.170.000 | Rp | 101.890.000 | 66,27% | Rp | 7.280.000 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp 56.450.000 | Rp 50.415.000 | 89,31% | Rp 6.035.000 |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Rp 56.450.000 | Rp 50.415.000 | 89,31% | Rp 6.035.000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rp 52.720.000 | Rp 51.475.000 | 97,64% | Rp 1.245.000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Rp 52.720.000 | Rp 51.475.000 | 97,64% | Rp 1.245.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp 11.323.595.000 | Rp 10.386.337.554 | 87,34% | Rp 937.257.446 |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rp 2.722.879.000 | Rp 2.658.266.000 | 93,35% | Rp 64.613.000 |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Rp 39.050.000 | Rp 36.000.000 | 92,19% | Rp 3.050.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 2.683.829.000 | Rp 2.622.266.000 | 97,71% | Rp 61.563.000 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|--------|----------------|
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Rp 8.600.716.000 | Rp 7.728.071.554 | 85,44% | Rp 872.644.446 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Rp 6.197.421.950 | Rp 5.842.164.904 | 94,27% | Rp 355.257.046 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rp 2.403.294.050 | Rp 1.885.906.650 | 78,47% | Rp 517.387.400 |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 16.000.000 | Rp 14.850.000 | 92,81% | Rp 1.150.000 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp 16.000.000 | Rp 14.850.000 | 92,81% | Rp 1.150.000 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait | Rp 16.000.000 | Rp 14.850.000 | 92,81% | Rp 1.150.000 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 29.608.000 | Rp 29.608.000 | 100% | - |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp 29.608.000 | Rp 29.608.000 | 100% | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Rp | 12.000.000 | Rp | 12.000.000 | 100% | - |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Rp | 17.608.000 | Rp | 17.608.000 | 100% | - |
| | TOTAL ANGGARAN | Rp | 22.203.855.188 | Rp | 20.198.155.537 | 90.97% | Rp 2.005.699.651 |

- Ket :** 1.  Program
2.  Kegiatan
3.  Sub. kegiatan

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
K a b u p a t e n Tanjung Jabung Barat.

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026 | Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) n-2 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) n-1 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | |
|------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) n-1 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 (5+7+9) | 11 = (10/4) | |
| 7 | Unsur Kewilayahan | | | | | | | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 83% |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 83% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 42 Dokumen | 28 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% | 7 Dokumen | 35 Dokumen | 83% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 84 Laporan | 56 Laporan | 14 Laporan | 14 Laporan | 100% | 14 Laporan | 70 Laporan | 83% |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 85,5% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 426 Orang/bulan | 231 Orang/bulan | 77 Orang/bulan | 74 orang/bulan | 96% | 71 orang/bulan | 376 orang/bulan | 88% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 72 Dokumen | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 60 Dokumen | 83% |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 91,3% |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1002 Paket | 507 Paket | 166 Paket | 166 Paket | 100% | 161 paket | 834 paket | 83% |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 120 orang | 1 paket | 20 Paket | 4 Paket | 20% | 5 Paket | 10 paket | 8,3% |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Umum | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 83% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 90 Paket | 35 Paket | 15 Paket | 15 paket | 100% | 15 paket | 65 Paket | 72% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 144 Paket | 72 Paket | 24 Paket | 24 paket | 100% | 24 paket | 120 paket | 83% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan | 72 Paket | 36 paket | 12 paket | 12 paket | 100% | 12 paket | 60 paket | 83% |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 36 Paket | 18 paket | 6 paket | 6 paket | 100% | 6 paket | 30 paket | 83% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 72 Dokumen | 36 Dokumen | 0 | 0 | 0% | 0 Dokumen | 36 Dokumen | 50% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 72 Laporan | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 60 Laporan | 83% |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 83% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 14 Unit | 2 unit | 1 unit | 1 unit | 100% | 18 unit | 4 unit | 29% |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 13 Paket | 3 paket | 0 | 0 | 0% | 2 paket | 5 paket | 38% |
| | Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 70 unit | 65 unit | 3 unit | 3 unit | 100% | 1 unit | 69 unit | 99% |
| | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 83% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 72 Laporan | 36 Laporan | 12 laporan | 12 Laporan | 100% | 12 laporan | 60 laporan | 83% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 72 Laporan | 36 laporan | 12 laporan | 12 Laporan | 100% | 12 laporan | 60 laporan | 83% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 72 Laporan | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 laporan | 60 laporan | 83% |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 83% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 198 Unit | 99 unit | 33 unit | 25 unit | 100% | 15 unit | 139 unit | 70% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara | 120 Unit | 75 unit | 30 unit | 25 unit | 100% | 15 unit | 115 unit | 95% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 56 gedung | 10 unit | 9 unit | 9 unit | 100% | 1 unit | 20 unit | 56% |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 383,05 Mutu Layanan | 249,37 Mutu Layanan | 70,90 mutu layanan | 81,57 mutu layanan | 115% | 86,25 mutu layanan | 417,17 mutu layanan | 108% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| 7.01.02.2.0 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Rapat Koordinasi | 18 Kali | 9 kali | 3 kali | 3 kali | 100% | 3 kali | 15 kali | 83% |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 18 Laporan | 9 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 100% | 3 Laporan | 15 laporan | 83% |
| 7.01.02.2.0 4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | 144 Urusan | 72 Urusan | 24 urusan | 24 urusan | 100% | 24 urusan | 120 urusan | 83% |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 72 Dokumn | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 dokumen | 100% | 12 Dokumen | 60 Dokumen | 83% |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------|-----|
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 83% |
| 7.01.03.2.0 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa | 60 Kali | 6 Kali | 2 kali | 2 kali | 100% | 10 kali | 50 kali | 83% |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 30 Lembaga Masyarakat | 6 dokumen | 2 Dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 Dokumen | 10 Dokumen | 83% |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 12 Dokumen | 6 Dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 Dokumen | 10 Dokumen | 83% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------|
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 48 laporan | 24 Laporan | 8 Laporan | 8 laporan | 100% | 8 laporan | 40 laporan | 83% |
| 7.01.03.2.0 2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Program Kerja Kelurahan | 12 Kegiatan | 6 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 2 kegiatan | 10 kegiatan | 83% |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 144 unit | 72 unit | 24 unit | 20 unit | 83% | 20 unit | 112 unit | 77% |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1002 Pokmas | 501 Pokmas | 167 pokmas | 167 pokmas | 100% | 167 pokmas | 835 pokmas | 83% |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam | 36 Notulen | 18 Notulen | 6 Laporan | 6 laporan | 100% | 6 Laporan | 30 Laporan | 83% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------|------|
| 7.01.04.2.0 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | 36 kali | 18 kali | 6 Kali | 6 kali | 100% | 6 kali | 30 kali | 83% |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 laporan | 6 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 2 laporan | 10 laporan | 83% |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 6 Laporan | 2 laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 10 Laporan | 83 % |
| | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi | 600% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 500% | 83% |
| 7.01.06.2.0 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa | 12 Desa | 6 Desa | 2 Desa | 2 Desa | 100% | 2 Desa | 10 Desa | 83% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen | 6 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 10 Dokumen | 83% |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 12 Dokumen | 6 dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10 Dokumen | 83% |
| | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataa, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat pada Tahun 2025 kita lihat pada tabel di atas dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan . Adapun Plafon anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 22,303 855,188,- yang terdiri dari belanja Operasi Rp. 17,036,613,438,- dan belanja Modal sebesar Rp. 5,167,241,750,- dari pagu tersebut terealisasi Belanja keseluruhan sebesar Rp. 20.198.155.537,- .dengan Capaian Kinerja 90,97%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tungkal Ilir

Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan Pembangunan di Kabupaten tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan

perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran

| no | Tujuan | sasaran | Indikator tujuan |
|----|--|---|---|
| | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berintegritas dan adaptif | Meningkatnya akseibilitas dan kualitas pelayanan public kepada masyarakat | Nilai survey kepuasan Masyarakat. Nilai AKIP OPD |
| | | Meningkatnya kemajuan desa secara berkelanjutan | Rata – rata Indeks Desa |
| | | Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat | Presentase Penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas Sektor |

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja

ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja program. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut dibawah.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renja Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | Catatan Analisa |
|----|---|-----------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | Tahun 2022 (n- 2) | Tahun 2023 (n- 2) | Tahun 2024 (n- 1) | Tahun 2025 | Tahun 2026 (n+1) | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Nilai IKM | | | 70,50 | 70,15 | 70,90 | 86,00 | 86,25 | 82,09 | 84,09 | 81,57 | 82,85 | Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, Kecamatan Tungkal Ilir telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai kepuasan masyarakat menunjukkan tren peningkatan setiap tahun serta melampaui target yang telah ditetapkan.” |
| 2 | Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi | | | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Upaya penanganan stunting di Kecamatan Tungkal Ilir dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui koordinasi dan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.” |
| 3 | Nilai SAKIP | | | 56,00 | 60,15 | 60,20 | 79,00 | 79,00 | 49,37 | 71,40 | 77,35 | 79,06 | Nilai SAKIP Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan peningkatan setiap tahun, dari 49,37 pada tahun 2022 menjadi 79,06 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja.”. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 4 | Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | arget dan realisasi pada indikator persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejak tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir telah menyusun APBD Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." |
| 5 | Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sejak tahun 2024 target dan realisasi indikator telah tercapai sebesar 100%, yang menunjukkan seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec. Tungkal Ilir.

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Tungkal Ilir.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kecamatan Tungkal Ilir bekerja dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas, dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Tungkal Ilir yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan

hasil yang optimal, efisien, dan efektif

4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan
5. dan para pemangku jabatan, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Tungkal Ilir ;
7. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurangnya Staf di setiap bidang sehingga membuat terbatasnya jangkauan atau kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja yang berbasis Teknologi ,
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen Perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan.
2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Sarana prasarana untuk fasilitas Kantor seperti Musolla dan ruang Pelayanan yang untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir merupakan masyarakat yang bersifat **heterogen dan majemuk**, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial budaya yang hidup berdampingan serta saling berinteraksi dalam

kehidupan bermasyarakat maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Tungkal Ilir untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Tungkal Ilir telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan dan tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Tungkal Ilir .

Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Catatan Penting |
|-------|---|-------------------|--|----------------|-----------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Pagu(Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor | | 4.168.358.719 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor | | 42.000.000 | |
| 1.1 | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan | | 110.400.000 | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan | | 42.000.000 | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 54.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 20.000.000 | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordimasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 Laporan | 56.400.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordimasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 Laporan | 22.000.000 | |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD | | 12.275.039.026 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD | | 9.000.000.000 | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 71 orang/bulan | 11.495.039.026 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 71 orang/bulan | 8.750.000.000 | |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 17 Dokumen | 780.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 250.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|--|------------|--------------------|---|-------------------|--|------------|--------------------|--|
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN | | 390.800.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN | | 135.000.000 | |
| 1.3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 167 Paket | 270.800.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 167 Paket | 85.000.000 | |
| 1.3.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 20 orang | 120.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 10 orang | 50.000.000 | |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan Layanan Administrasi Umum | | 930.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan Layanan Administrasi Umum | | 593.939.491 | |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 30 Paket | 96.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 20 Paket | 35.000.000 | |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 24 Paket | 216.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 24 Paket | 131.116.261 | |
| 1.4.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 Paket | 114.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 Paket | 110.503.243 | |
| 1.4.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 6 Paket | 102.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 10 Paket | 88.500.000 | |
| 1.4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 12 Dokumen | 42.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 12 Dokumen | 33.275.000 | |
| 1.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 360.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 195.544.987 | |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD | | 918.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD | | 313.000.000 | |
| 1.5.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 4 unit | 486.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 4 unit | 151.000.000 | |
| 1.5.2 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 3 Paket | 192.000.000 | Pengadaan Mebel | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 3 Paket | 77.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|--|------------|----------------------|--|-------------------|--|------------|----------------------|--|
| 1.5.3 | Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 5 unit | 240.000.000 | Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 5 unit | 85.000.000 | |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | 1.614.372.480 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | 1.385.400.000 | |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 54.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 50.000.000 | |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 9 Laporan | 180.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 9 Laporan | 95.400.000 | |
| 1.6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 1.380.372.480 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 1.240.000.000 | |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara | | 693.210.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara | | 268.750.000 | |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 16 unit | 283.410.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 16 unit | 110.000.000 | |
| 1.7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Tungkal ilir | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara | 4 unit | 72.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Tungkal ilir | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara | 8 unit | 48.750.000 | |
| 1.7.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Kec. Tungkal ilir | Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 unit | 337.800.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Kec. Tungkal ilir | Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 110.000.000 | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 209.384.400 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 97.000.000 | |
| 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Rapat Koordinasi | | 122.984.400 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Rapat Koordinasi | | 97.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|---|------------|-----------------------|--|-------------------|---|------------|----------------------|--|
| 2.1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinegi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3 Laporan | 122.984.400 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinegi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3 Laporan | 97.000.000 | |
| 2.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | | 86.400.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | | 45.000.000 | |
| 2.2.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 12 Dokumen | 86.400.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 12 Dokumen | 45.000.000 | |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna | | 3.775.982.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna | | 3.001.282.000 | |
| 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa | | 3.720.000.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa | | 3.001.282.000 | |
| 3.1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 2 Dokumen | 72.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 2 Dokumen | 29.282.000 | |
| 3.1.2 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 2 Dokumen | 48.000.000 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 2 Dokumen | 22.000.000 | |
| 3.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8 Laporan | 3.600.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8 Laporan | 2.950.000.000 | |
| 3.2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Jumlah Program Kerja Kelurahan | | 15.600.000.000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Jumlah Program Kerja Kelurahan | | 2.310.850.000 | |
| 3.2.1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 16 unit | 13.200.000.000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 16 unit | 10.850.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---|------------|--------------------|---|---------------|---|------------|-------------------|--|
| 3.2.2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kec. Tungalir | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 Dokumen | 2.400.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kec. Tungalir | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 Dokumen | 2.300.000.000 | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam | | 40.000.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam | | 40.000.000 | |
| 4.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | | 60.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | | 40.000.000 | |
| 4.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait | Kec. Tungalir | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 24.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait | Kec. Tungalir | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 20.000.000 | |
| 4.1.2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Tungalir | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 Laporan | 36.000.000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Tungalir | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 Laporan | 20.000.000 | |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi | | 240.000.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi | | 87.500.000 | |
| 5.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 240.000.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 87.500.000 | |
| 5.1.1 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Tungalir | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2 Dokumen | 60.000.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Tungalir | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2 Dokumen | 25.000.000 | |
| 5.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Tungalir | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | 60.000.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Tungalir | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | 20.000.000 | |
| 5.1.3 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Tungalir | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | 60.000.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Tungalir | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | 22.500.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|--|-----------|------------|--|-------------------|--|-----------|------------|
| 5.1.4 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataa, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 2 Dokumen | 60.000.000 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kec. Tungkal ilir | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataa, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 2 Dokumen | 20.000.000 |
|-------|--|-------------------|--|-----------|------------|--|-------------------|--|-----------|------------|

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir merupakan hasil dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil Muskel (musyawarah Kelurahan atau di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang Desa/Kelurahan akan diusulkan di tingkat Kecamatan.

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang Desa/Kelurahan yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Desa/Kelurahan.

Sedangkan tujuan khususnya adalah menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa dan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Desa.

Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 2 (Dua) desa dan Musrenbang Kelurahan di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara melalui penciptaan system pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah:

- i penguatan perencanaan dan penganggaran;
- ii pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*);
- iii penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta
- iv penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*)

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandaidengan; terwujudnya system pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya aksespublik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir menjalankan fungsinya sebagai salah satu perangkat pelaksana kewenangan otonomi daerah dengan program dan kegiatan :

1. Tersusunnya Rencana Strategis OPD Kantor Camat Tungkal Ilir Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan.

2. Terpenuhinya fungsi perencanaan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tungkal Ilir

A. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 yaitu

“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2026” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Program di Kecamatan, menetapkan **Visi Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

Mewujudkan Kecamatan Tungkal Ilir yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya

”. Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. **Maju** mengandung makna Aparat yang Profesional serta mempunyai integritas yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. **Berdaya** mengandung makna :
 - a. Memiliki daya saing yang tinggi
 - b. Memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan dan ekonomi
3. **Berbudaya** mengandung makna adanya kondisi yang ideal dalam kehidupan beragama dan berbudaya serta menjaga adat istiadat..

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Tungkal Ilir mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme institusi dan sumber daya aparat kecamatan

2. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
3. Membangun perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
4. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ditetapkan tujuan OPD Kantor Kec.

Tungkal Ilir sebagai berikut :

1. Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok;
2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaransasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan;
- c. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Tabel 3.2.
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | - | 70,00 | 70,15 | 70,90 | 86,00 | 86,25 |
| | | | 2. Persentase Kegiatan penanganan Kemiskinan/stunting yang terfasilitasi | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 3. Nilai AKIP SKPD | - | 56,00 | 60,15 | 60,20 | 79,00 | 80,00 |
| | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan | - | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.3. Program dan Kegiatan

Kantor Camat Tungkal Ilir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 merencanakan beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu: 1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
15. Penyediaan jasa surat menyurat
16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
24. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
27. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
32. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
33. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana telah dituangkan dalam bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian masing-masing sasaran. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 dikelompokkan sesuai sasaran dan sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan Tungkal Ilir dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 86.25 mutu pelayanan di capai dengan melaksanakan *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 16.931.621.506-.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 menjalankan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Untuk menunjang sasaran kualitas pelayanan public dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir juga melaksanakan *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik* dengan kebutuhan dana sebesar Rp 209.364.400,- yang didukung Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
 9. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non usaha

SASARAN 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 71.61% yang akan di capai dengan melaksanakan *program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 24.000.000..

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 menjalankan program Pembinaan dan Pengawasan Desa yang didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Dua Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- e. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

SASARAN 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kecamatan

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Persentase sarana dan prasarana

Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 100% yang akan di capai dengan melaksanakan *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan* dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 19.320.000.000-

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

11. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa

-
- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

SASARAN 4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Persentase laporan kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan social wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 100% yang akan di capai dengan melaksanakan *Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum* dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 80.000.000 ,-

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 menjalankan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

13. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target indikator kinerja sasaran diatas, sebesar Rp. **36.761.005.906,-**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050

Nama OPD : Kantor Kecamatan Tungkal Ilir

| Kod> | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Kinerja | Indikator | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | |
|------|---|---------|-----------|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------|----------------|----------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | | | | | | 12.334.826.333 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan | | | 46.332.482 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Tungkal Ilir | 6 Dokumen | 16.397.920 | APBD | 6 Dokumen | 18.037.712 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Tungkal Ilir | 14 Dokumen | 14.641.000 | APBD | 14 Dokumen | 28.294.770 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Laporan Keuangan Tahunan OPD | | | 10.954.970.298 | | | 8.796.014.823 |
| 7 | 01 | 01 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Tungkal Ilir | 71 orang/bulan | 10.260.642.459 | APBD | 71 orang/bulan | 8.032.254.200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|--|--|--|--|--|-------------------|------------|--------------------|------|------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Tungkal Ilir | 17 Dokumen | 694.327.839 | APBD | 17 Dokumen | 763.760.623 |
| 7 | 01 | 01 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Tingkat Kedisiplinan Pegawai/ASN | | | 245.531.540 | | | 330.084.694 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|-------------------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kec. Tungkal Ilir | 167 Paket | 145.531.540 | APBD | 167 Paket | 160.084.694 |
| 7 | 01 | 01 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan | Kec. Tungkal Ilir | 20 orang | 100.000.000 | APBD | 20 orang | 170.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan Layanan Administrasi Umum | | | 565.503.705 | | | 736.954.590 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 15 Paket | 36.602.500 | APBD | 15 Paket | 40.262.750 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 80 Paket | 131.116.261 | APBD | 80 Paket | 144.227.887 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 07 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket bahan logistik yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 2500 Paket | 95.503.243 | APBD | 2500 Paket | 105.053.567 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 08 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 50500 Paket | 73.461.714 | APBD | 50500 Paket | 80.807.885 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 400 Dokumen | 33.275.000 | APBD | 400 Dokumen | 36.602.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Tungkal Ilir | 15 Laporan | 195.544.987 | APBD | 15 Laporan | 330.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|--|--|---|---|---|-------------------|---------|--------------------|------|---------|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD | | | 476.135.000 | | | 548.371.500 |
| 7 | 01 | 01 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 6 unit | 319.440.000 | APBD | 1 unit | 223.923.000 |
| 7 | 01 | 01 | | | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 8 Paket | 113.135.000 | APBD | 1 Paket | 124.448.500 |
| 7 | 01 | 01 | | | Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 8 unit | 43.560.000 | APBD | 4 unit | 200.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | 879.806.972 | | | 1.333.885.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Tungkal Ilir | 200 Laporan | 7.496.192 | APBD | 200 Laporan | 45.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 3 Laporan | 141.432.060 | APBD | 3 Laporan | 138.574.600 |
| 7 | 01 | 01 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Kec. Tungkal Ilir | 96 Laporan | 730.878.720 | APBD | 96 Laporan | 1.150.310.400 |
| 7 | 01 | 01 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | | | 493.802.949 | | | 543.183.244 |
| 7 | 01 | 01 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kec. Tungkal Ilir | 39 unit | 247.181.779 | APBD | 39 Unit | 271.899.957 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|-------------------|------------|----------------------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Mebel yang ddielihara | Kec. Tungkal Ilir | 30 Unit | 15.000.000 | APBD | 30 Unit | 16.500.000 | |
| 7 | 01 | 01 | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara | Kec. Tungkal Ilir | 10 unit | 108.971.170 | APBD | 3 unit | 119.868.287 | |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kec. Tungkal Ilir | 1 unit | 122.650.000 | APBD | 1 unit | 134.915.000 | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | 234.607.384 | | 258.068.122 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Rapat Koordinasi | | | 102.487.000 | | | 112.735.700 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Tungkal Ilir | 3 Laporan | 102.487.000 | APBD | 3 Laporan | 112.735.700 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | | | 132.120.384 | | | 145.332.422 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Kec. Tungkal Ilir | 12 Dokumen | 132.120.384 | APBD | 12 Dokumen | 145.332.422 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 21.040.958.838 | | 23.145.054.722 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa | | | 3.627.539.078 | | | 3.990.292.986 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|-------------------|--------------|-----------------------|------|--------------|-----------------------|
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Tungkal Ilir | 2 desa/8 kel | 29.282.000 | APBD | 2 desa/8 kel | 32.210.200 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kec. Tungkal Ilir | 12 bln | 157.198.660 | APBD | 12 bln | 172.918.526 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Tungkal Ilir | 7 Laporan | 3.441.058.418 | APBD | 630 org | 3.785.164.260 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Jumlah Program Kerja Kelurahan | | | 17.413.419.760 | | | 19.154.761.736 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | Kec. Tungkal Ilir | 24 Unit | 13.310.000.000 | APBD | 8 kel | 14.641.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kec. Tungkal Ilir | 167 pokmas | 4.103.419.760 | APBD | 167 org | 4.513.761.736 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 91.140.225 | | | 100.254.248 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | | | 91.140.225 | | | 100.254.248 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|-------------------|-----------|--------------------|------|------------|--------------------|
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Tungkal Ilir | 1 Laporan | 18.540.225 | APBD | 1 keg | 20.394.248 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Tungkal Ilir | 4 Laporan | 72.600.000 | APBD | 12 Laporan | 79.860.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 100.781.718 | | | 136.220.760 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa | | | 100.781.718 | | | 136.220.760 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | 2 Dokumen | 24.382.589 | APBD | 2 Dokumen | 52.181.718 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Tungkal Ilir | 2 Dokumen | 12.100.000 | APBD | 2 Dokumen | 13.310.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | Kec. Tungkal Ilir | 2 Dokumen | 20.000.000 | APBD | 2 Dokumen | 22.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Tungkal Ilir | 2 Dokumen | 17.182.000 | APBD | 2 Dokumen | 18.900.200 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kec. Tungkal Ilir | 2 Dokumen | 27.117.129 | APBD | 2 Dokumen | 29.828.842 |

1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tungkal Ilir, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Tungkal Ilir, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2025 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya

yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Tungkal Ilir diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

CAMAT TUNGKAL ILIR



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ilir tahun 2026, sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kantor Kecamatan Tungkal Ilir, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kuala Tungkal, 12 Agustus 2025

CAMAT TUNGKAL ILIR



NIP.197105032006041002